

PENDIDIKAN AGAMA BERWAWASAN MULTIKULTURAL

Sebuah Konsep Alternatif

Zakiyuddin Baidhawiy

Penulis buku *Dialog Global dan Masa*

Depan Agama (2001) dan Ambivalensi

Agama, Konflik dan Nirkekerasan (2002),

dan Peneliti pada Pusat Studi Budaya dan

Perubahan Sosial Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Tiga dekade lamanya bangunan kerukunan umat beragama di Indonesia—kerukunan antarumat beragama, intra umat beragama, dan antarumat beragama dan pemerintah—di bawah motto *Bhinneka Tunggal Ika*, dipelihara lewat suatu mekanisme birokratis dan struktural. Untuk memelihara kerukunan dan kesatuan ini, pemerintah Orde Baru menyelenggarakan suatu kebijakan toleransi sosial yang menuntut bahwa tindakan apapun yang mengarah pada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) harus dijauuhkan. Orde Baru menerapkan kebijakan itu secara represif. Suasana hubungan antar umat beragama di Indonesia ditengarai banyak pengamat

dalam dan luar negeri sebagai terbaik kala itu. Penekanan pada pendekatan *top-down* ini baru menemukan kegagalannya bersamaan dengan menjelang dan pasca kejatuhan rezim Orde Baru. Ini ditandai dengan semaraknya aksi kekerasan—langsung maupun tidak langsung, struktural maupun kultural—dan konflik antaragama, antaretnik, antarkelompok masyarakat, dan konflik politik. Merentang dari Aceh, Timor Timur, Sanggau Ledo, Situbondo, Jakarta, Solo, Sampit, Maluku, dan Poso. Semua rentetan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat memprihatinkan ini terjadi dalam 7 tahun terakhir. Nyata sudah bahwa konstruk harmoni yang selama ini dibangun lebih merupakan sarang laba-laba yang rapuh dan mudah hancur. Teologi kerukunan yang telah ditegakkan rezim lama bersifat pasif dan tidak dinamis sehingga gagal menangkap gejala-gejala akan runtuhnya harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama itu pula, pendidikan di Indonesia sedikit menyentuh persoalan bagaimana menghargai kepercayaan-kepercayaan keagamaan dan keragaman kultural yang sangat kaya. Ada kecenderungan homogenisasi di bawah payung kebudayaan nasional, hegemoni kebudayaan Jawa sebagai pusat dan kebudayaan lain sebagai pinggiran, dan pemiskinan

budaya dengan meringkas keragaman identitas kultural sejumlah provinsi. Proses homogenisasi, hegemoni dan pemiskinan budaya itu diajarkan dalam *civic education*, seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa, Kewiraan, Penataran P4, dan bahkan Pendidikan Agama.

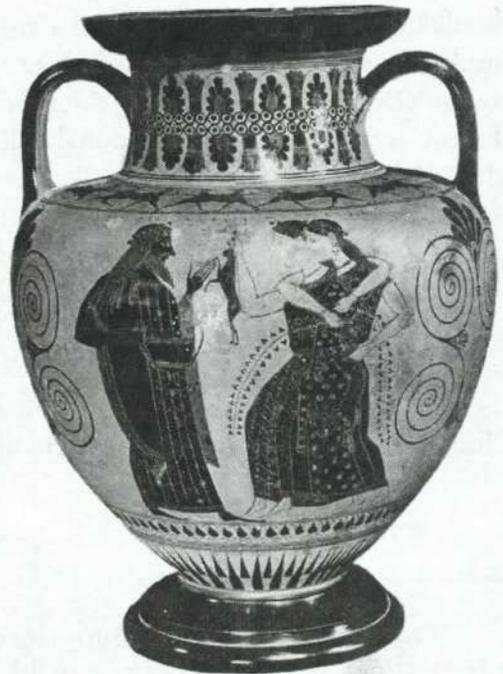
Model pendidikan tradisional ini secara umum menggambarkan problem *civic education* dan Pendidikan Agama (*religious education*) yang tidak dimodifikasi oleh pluralisme demokratis dan multikulturalisme. Model pendidikan semacam ini menyembunyikan secara sistemik nilai saling menghargai (*mutual respect*) dari berbagai jalan hidup, dan mengabaikan kontribusi kelompok-kelompok minoritas terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia. Ketika negara atau sekolah mengajarkan pada rakyatnya bahwa agama-agama yang diakui secara formal sebagai tertuang dalam GBHN, identitas kultural sebanyak jumlah provinsi, organisasi sosial dan politik harus berasas tunggal, dan para pahlawan hanyalah mereka yang pribumi, itu artinya pendidikan gagal mengajarkan nilai-nilai tentang pluralisme demokratis dan ketidaktaatan pada hukum yang lacur. Tanpa mengajarkan nilai-nilai demokrasi, negara dan sekolah telah mengurangi peran keragaman dan membatasi diri pada alternatif politik secara tidak bebas pada siswa dan masyarakat.

Paper ini bermaksud memaparkan lebih jauh suatu tawaran tentang model Pendidikan Agama dengan modifikasi multikulturalisme, secara berturut-turut

pembahasan meliputi: alasan kebutuhan akan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural (Selanjutnya disebut PABM); definisi dan asumsi-asumsinya; orientasi pendidikan dari sudut muatan, siswa dan lingkungan sosial; serta hasil akhir yang akan dicapai.

Urgensi dan Signifikansi

Multikulturalisme biasa didefinisikan sebagai gerakan sosial-intelektual yang mendorong nilai-nilai keberagaman (*diversity*) sebagai prinsip inti dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok budaya diperlakukan setara (*equal*) dan sama-sama dihormati. Isu multikulturalisme di Indonesia semakin terasa signifikan dan memperoleh tempat



dalam kehidupan kontemporer saat ini, bersamaan dengan munculnya kesadaran perlunya memperbaiki tatanan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah rusak oleh tindakan-tindakan kekerasan dengan berbagai macam alasan dan bentuk. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa multikulturalisme harus diakomodasi dalam sistem pendidikan kewarganegaraan umumnya, dan Pendidikan Agama khususnya.

Realitas Bangsa yang Sangat Plural

Kekayaan akan keanekaragaman—agama, etnik, dan kebudayaan—ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan dapat memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa, dan dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan, baik konflik vertikal maupun horizontal. Krisis multidimensi yang berawal sejak pertengahan 1997 dan ditandai dengan kehancuran perekonomian nasional, sulit dijelaskan secara mono-kausal. Faktor-faktor yang terlibat terlalu kompleks dan saling terkait: ada faktor kepentingan internasional dan kepentingan nasional, sejarah kolonial, sumberdaya alam yang tersedia, keragaman etnik, iklim, agama-agama, tradisi, globalisasi dan konflik dingin antara Barat dan Timur. Cukup

banyak konflik komunal yang terjadi sepanjang krisis, dan itu diperparah dengan konflik elite politik yang membuang-buang waktu dan mengarahkan negara pada perang sipil.¹

Sebuah permulaan yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia dalam menyambut abad ke-21. Krisis moneter dan politik yang berlarut-larut bergerak dalam suatu proses interrelasi yang sangat kompleks telah menghasilkan kekacauan yang sulit diprediksi. Berbagai ragam kekerasan bersilang sengkabut dengan proses demokratisasi yang mandul. Dalam konteks ini, konsep masyarakat madani dan hubungannya dengan demokratisasi diperdebatkan, sementara *economic recovery* berjalan lambat dan reorientasi ekonomi pasca era konglomerat masih terbuka untuk dipersoalkan. Pada saat yang sama aparat negara yang berkuasa gagal ketika monopoli kekuasaan terdesentralisasi tanpa skenario yang jelas.

Otonomi daerah yang tak terkendali telah melahirkan *raja-raja kecil* dengan *chauvinisme* etnik yang memperparah situasi konflik dan ketegangan. Ruang demokrasi yang terbuka kurang dapat dimanfaatkan oleh demokrat sejati daripada para elite anti demokrasi yang seringkali memanipulasi sentimen etnik dengan maksud untuk melemahkan

¹Kasus-kasus konflik komunal dan perang sipil di Indonesia dibahas cukup panjang lebar dalam *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah dan The Konrad Adenauer Foundation, 2002)

tuntutan akan demokratisasi. Demokratisasi nampaknya gagal di lingkungan di mana institusi-institusi demokrasi lemah dan para elitnya tidak dapat mengadopsi demokrasi. Agaknya, masyarakat Indonesia sedang memetik akibat politisasi etnisitas yang dieksploitasi secara semena-mena oleh para elite lokal yang cenderung mengedepankan ikatan primordial di mana etnisitas hanya dimaknai sebagai realitas nenek moyang dan fundamental.²

Perbedaan kelompok-kelompok keagamaan, kelompok etnik, dan kelompok sosio-kultural yang semakin meningkat dari segi ukuran dan signifikansi politik dalam beberapa tahun terakhir, melahirkan tuntutan agar kebijakan dan program-program sosial responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan keragaman tersebut. Memenuhi tuntutan ini menuntut kepekaan kultural (*cultural sensitivity*), koalisi pelangi, dan negosiasi-kompromi secara pluralistik pula. Ketegangan etnik dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu dapat diakselerasi, dan akibatnya terjadi persaingan terhadap berbagai sumberdaya yang terbatas seperti lapangan pekerjaan, perumahan, kekuasaan politik, dan sebagainya. Semua persoalan krusial tersebut tidak akan terpecahkan tanpa

pengetahuan fundamental tentang, kepekaan terhadap, dan penghargaan atas berbagai pengalaman, perspektif, dan masyarakat yang beragam secara etnik maupun kultural, dan kebijakan multikulturalisme yang meliputi *power sharing* serta *cultural recognition*³ di antara kelompok-kelompok yang terlibat.

Berkenaan dengan yang terakhir, dua kebijakan multikulturalisme yang biasa diterapkan dalam konteks negara plural ini saling melengkapi satu sama lain: varian pembagian kekuasaan (*power sharing*) lebih dari sekadar distribusi pengakuan akan simbol-simbol budaya, tetapi yang lebih fundamental adalah alokasi kekuasaan, hak-hak istimewa dan sumberdaya; dan varian kultural, dengan kebijakan resmi mengakomodasi klaim suatu kelompok untuk mempertahankan sekurang-kurangnya sebagian praktik budaya yang unik sembari berpartisipasi secara simultan dalam nilai-nilai dan sistem kepercayaan negara-bangsa yang lebih besar. Pendidikan multikultural diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena itu, masa depan bangsa Indonesia, pendidikan untuk saling memahami dan tentang pluralisme kultural sangat berhubungan erat.

² Studi yang cukup representatif tentang fenomena baru kebangkitan elite lokal pasca kejatuhan Soeharto dalam memperebutkan sumberdaya ekonomi dan kekuasaan dengan memanipulasi isu dan politisasi etnisitas dapat dilihat pada karya Gerry van Klinken, "Indonesia's New Ethnic Elites", dalam Henk Schulte Nordholt dan Irwan Abdullah, eds. *Indonesia in Search of Transition* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 67-106

³ Lihat lebih lanjut Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies* (New Haven: Yale University Press, 1977); dan Charles Taylor, *Multiculturalism and the Politics of Recognition* (Princeton, 1992)

Pengaruh Budaya dan Etnisitas⁴ terhadap Perkembangan Manusia

Kebudayaan membentuk perilaku, sikap, dan nilai manusia. Perilaku manusia adalah hasil dari proses sosialisasi, dan sosialisasi selalu terjadi dalam konteks lingkungan etnik dan kultural tertentu. Manusia adalah makhluk sosial yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, pengalaman kultural dan warisan kolektif. Ketika seorang pendidik mengklaim bahwa prioritas utamanya adalah memperlakukan semua siswa sebagai umat manusia, tanpa memandang identitas etnik, latar belakang budaya, atau status ekonomi, ia telah menciptakan suatu paradoks. Kemanusiaan seseorang tidak dapat diasingkan dari dan dipisahkan dari kebudayaan dan etnisitasnya. Kita tidak dapat menjadi manusia tanpa kebudayaan dan etnisitas, dan kita tidak dapat memiliki kebudayaan dan etnisitas tanpa menjadi manusia. Melihat ada banyak warna pada siswa, berarti pendidik benar-benar

melihat mereka sebagai manusia sejati. Karena itu, mengakui dan saling menghargai satu sama lain sebagai manusia menghendaki kesaling-memahami (*mutual understanding*) dan apresiasi berdasarkan pemahaman kultural.

Pengaruh budaya dan etnisitas sejak awal telah nyata dan terus menjangkau keseluruhan proses perkembangan dan pertumbuhan manusia. Unsur-unsur sekunder kebudayaan dapat dimodifikasi sepanjang masa dan melalui pengalaman, tapi inti kebudayaannya (*core of culture*) terus menjadi arus utama keberadaan dan identitas manusia sepanjang hidupnya.

Sosialisasi budaya secara mendarah daging menjadi problematik dalam pendidikan ketika proses *schooling* hanya bertumpu pada satu model kultural dan mengabaikan seluruh kebudayaan lain, atau ketika siswa yang secara kultural beragam diharapkan mengesampingkan semua kebiasaan kultural mereka sebagai prasyarat keberhasilan dan capaian akademik di sekolah. Tuntutan semacam ini tidak hanya tak dapat dipertang-

⁴ Etnisitas dapat didefinisikan sebagai kesadaran kolektif kelompok yang menanamkan rasa memiliki yang berasal dari keanggotaan dalam komunitas yang terikat oleh keturunan dan kebudayaan yang sama. Diantara kelompok-kelompok lain dimana orang dapat berpartisipasi dan secara simultan berbagi identitas yang beragam, komprehensif dalam ruang lingkup dan dipaksa untuk setia. Kelompok etnik memberikan kegembiraan dengan memenuhi kebutuhan internal akan makna dan *sense of belonging*. Isaiiah Berlin menyatakan bahwa "sejauh orang membutuhkan makan dan minum, keamanan dan kebebasan bergerak, maka sejauh itu pula mereka membutuhkan rasa memiliki atas kelompok. Menjadi manusia berarti mampu merasa *at home* di manapun mereka berada dengan caranya sendiri". Berlin menolak gagasan tentang *tunawisma budaya* dan ketercerabutan orang yang hidup dalam wilayah kosmopolitanisme, karena orang tidak dapat berkembang kecuali mereka memiliki kebudayaan" (*ibid.*, 27). Lihat N. Gardels, "Two Concepts of Nationalism: An Interview with Isaiiah Berlin", *New York Review of Books*, 21 November 1991: 19-27

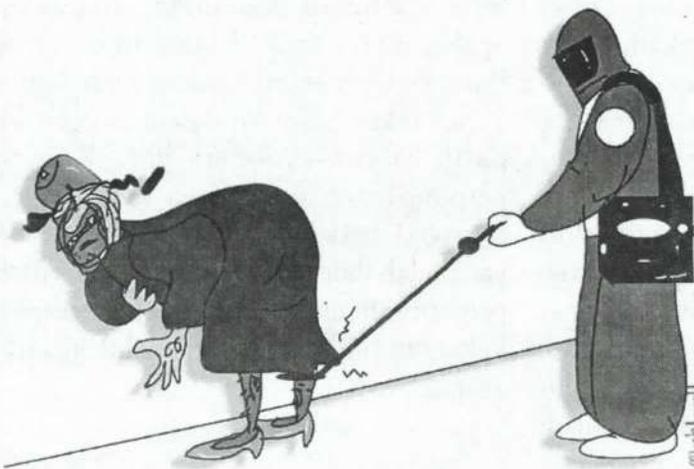
gungjawabkan bahkan tidak mungkin tercapai. Upaya mengikuti tuntutan ini dapat membawa pada adaptasi, marginalisasi, alienasi, dan isolasi kultural. Dengan perkecualian adaptasi, tak satu pun dari respons tersebut kondusif untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia dan keberhasilan akademik siswa. Ketidakseiringan dan diskontinuitas antara budaya sekolah dan budaya berbagai kelompok etnik membutuhkan analisa serius dalam membuat keputusan tentang program dan praktik pendidikan yang mencerminkan dan mempromosikan keragaman kultural. Ketidakseiringan atau diskontinuitas secara khusus penting untuk memahami aspek-aspek perilaku manusia yang secara langsung banyak berpengaruh pada proses belajar-mengajar, seperti orientasi nilai, hubungan antarpersonal, gaya komunikasi, penggunaan waktu, tampilan, aturan prosedural, dan sistem pemecahan masalah dan proses kognitif.

Banyak diskontinuitas terjadi antara

kebudayaan arus utama, seperti yang berlaku dalam prosedur sekolah, dan kebudayaan berbagai etnik berjalan pada level bawah sadar dan tanpa niat yang disengaja. Diskontinuitas terjadi ketika seseorang berperilaku secara alamiah, karena perilakunya sangat dipengaruhi oleh pengkondisian budaya. Kebijakan pendidikan yang bertanggung jawab dalam masyarakat multikultural, seperti Indonesia, tidak dapat berhasil bila para pemimpin dunia pendidikan terus menjalankan fungsi konvensional tanpa menyadari bagaimana kebudayaan membentuk sikap, nilai dan perilaku mereka dan siswa. Dengan menyadari bahwa mereka adalah produk kebudayaannya dan hidup dalam sistem nilai dan sistem simbol yang terberikan (*given*), pendidik dapat membebaskan diri mereka dari tirani kebudayaan mereka sendiri dan membebaskan siswa dari akibat buruk interpretasi kultural yang prematur, tidak akurat, dan penuh prasangka buruk atas perilaku yang dipengaruhi secara sosio-kultural.

Efektivitas Belajar tentang Perbedaan

Problem efektivitas belajar-mengajar untuk menanamkan kesadaran akan perbedaan. Salah satu premis pendidikan multikultural menyatakan bahwa belajar-mengajar merupakan proses kultural yang terjadi dalam konteks sosial.



Agar pengajaran dan belajar lebih dapat diakses dan adil bagi para siswa yang sangat beragam, kebudayaan-kebudayaan para siswa perlu lebih dipahami secara jelas. Pemahaman semacam ini dapat dicapai dengan menganalisis pendidikan dari berbagai perspektif budaya dan dengan cara ini dapat menghilangkan kebutaan terhadap pendidikan yang didominasi oleh pengalaman budaya dominan.

Sekolah adalah *epitome* (skala kecil) dari masyarakat. Dalam norma prosedural, kode perilaku, susunan struktural, distribusi kekuasaan, keistimewaan dan tanggung jawab, sekolah mencerminkan nilai-nilai kultural masyarakatnya. Guru, administrator sekolah, dan pembuat kebijakan membawa pengalaman dan perspektif kultural sendiri pada keputusan dan tindakan pendidikan, demikian pula siswa. Berbagai sistem budaya yang berbeda ini berjumpa dalam sekolah dan ruang kelas yang pluralistik dan dapat menimbulkan konflik budaya, yang hanya dapat dimediasi melalui efektifitas proses instruksional yang mencerahkan, membuka batasan-batasan kultural (*cultural boundaries*) yang kaku dan tidak cair.

Pengalaman Indonesia cukup menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam rangka mengatasi dan mengelola keragaman agama, etnik, dan kultural. Budaya dominan—budaya Jawa—seringkali muncul sebagai aktor utama dalam sistem pendidikan dan pembuatan keputusan. Bahkan, sebagaimana disebut di

awal, pada tingkat pembuat kebijakan (*policymakers*) pernah terjadi apa yang disebut sebagai proses pemiskinan identitas kultural dan etnik; homogenisasi di bawah payung kebudayaan nasional; dan hegemoni kebudayaan Jawa. Pada saat yang sama, *civic education* yang diharapkan menanamkan nilai-nilai toleransi, *mutual respect*, *mutual understanding*, keterbukaan dalam keragaman—etnik, kultural dan agama—, mengalami kegagalan serupa. Hal yang sama juga terjadi pada Pendidikan Agama. Pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah-sekolah agama lebih bercorak eksklusifis—mengajarkan sistem agamanya sendiri sebagai benar dan satu-satunya jalan keselamatan (*salvation and truth claim*) sembari merendahkan agama orang lain. Kalaupun disinggung mengenai pentingnya kerukunan antarumat beragama dalam dua macam pendidikan di atas, itu lebih bersifat permukaan. Istilah “kerukunan” yang diintrodusir lewat indoktrinasi sangat artifisial, karena tidak mencerminkan dialektika, dinamika, apalagi kerjasama. Selama masa Orde Baru, kerukunan merupakan suatu konfigurasi relasi harmoni dalam pengertian pasif, karena cara-cara dan skenario perjumpaan agama-agama (*religious encounters*) berada dalam satu *framework* yang telah didesain sedemikian rupa oleh pemerintah, tanpa melibatkan partisipasi kekuatan sipil dari para pemeluk agama-agama.

Benturan Global Antarkebudayaan

Usai Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya kekuatan Blok Timur, hancurnya Uni Sovyet pada dekade 90-an, dan runtuhnya Tembok Berlin di Jerman Timur, bergema sebuah tesis baru yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Samuel P. Huntington, melalui esainya yang terkenal, *The Clash of Civilization*⁵ yang dimuat dalam sebuah jurnal *Foreign Affairs* pada 1993 dan mendapatkan tanggapan banyak pakar dari berbagai negara di dunia. Tiga tahun kemudian, tesis ini dikembangkan lagi menjadi judul sebuah buku. Huntington menulis bahwa sumber mendasar konflik dunia baru bukan lagi bersifat ideologis atau ekonomis. Pemisahan terbesar antara umat manusia dan sumber konflik utama berasal dari kebudayaan atau peradaban. Negara-bangsa akan menjadi aktor kuat, tetapi konflik utama dalam politik global akan terjadi antarbangsa dan kelompok kebudayaan yang berbeda-beda. Huntington menyebut gesekan itu terjadi antara Barat dan Islam, Islam dan Hindu, Islam dan Ortodoks di Rusia, Cina, dan Jepang. Pendapat ini didasarkan pada hipotesis bahwa setelah berakhirnya ketegangan antara dua kekuatan adikuasa, AS dan Sovyet, orang akan cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok

yang lebih besar. Kecenderungan semacam ini terjadi di seluruh dunia.

Sebagai bukti, konflik-konflik dalam skala lokal hampir terjadi di mana-mana: etnik Tutsi dan Hutu di Afrika, Ortodoks Serbia dan Muslim Bosnia di eks-Yugoslavia, benturan antaretnik di Indonesia dan banyak tempat lain dapat menjadi contoh aktual untuk menguatkan tesis ini. Eropa memang terus mengupayakan supaya mereka bersatu dalam satu kesatuan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), namun penolakan terjadi oleh Inggris dan Norwegia yang merasa secara ekonomi tidak membutuhkan Uni Eropa. Terorisme anti Amerika kini menghantui seluruh dunia.

Tesis benturan antarkebudayaan nampaknya memperoleh penguatan dari Thomas Friedman dalam *The Lexus and the Olive Tree* (2000). Ia mengatakan bahwa dunia pasca Perang Dingin tetap terbelah menjadi dua kutub dalam bentuk yang belum pernah dijumpai sebelumnya karena proses globalisasi. Separuh dunia, terutama negara-negara kaya, keluar dari Perang Dingin dan membuat satu polar Lexus, mobil mewah buatan Toyota Jepang dengan teknologi canggih untuk mengejar kesempurnaan, sebagai simbol mereka. Sementara separuh dunia lain, yakni negara-negara miskin, masih berjuang tentang siapa memiliki pohon

⁵ Esai ini kemudian oleh Huntington dikembangkan menjadi buku berjudul *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996)

zaitun.

Dalam proses globalisasi, integrasi pasar dunia, negara-bangsa, dan teknologi yang memungkinkan individu, korporasi dan negara-bangsa menjangkau pelosok dunia lebih jauh dalam waktu relatif cepat dan biaya lebih murah, juga meninggalkan mereka yang tidak mampu membayar tiket globalisasi. Friedman menyebut globalisasi identik dengan Amerikanisasi dunia, kecenderungan homogenisasi kebudayaan pada tingkat tertentu. Mereka yang mampu membayar tiket globalisasi akan dapat membangun Lexus-lexus mereka, simbol modernisasi, ekonomi yang makin ramping, dan privatisasi berorientasi pasar, supaya bisa menjadi lebih makmur di tengah globalisasi. Sementara itu, separuh yang lain masing berjuang memperebutkan pohon zaitun, lambang akar budaya, asal-usul keluarga, komunitas, suku, bangsa, agama dan yang terutama tempat yang bisa disebut sebagai "rumah". Kita berkelahi mati-matian untuk pohon zaitun karena pohon ini memberi perasaan harga diri dan asal-usul, hal yang esensial untuk kelanjutan manusia. Karena itu, para pendukung multikulturalisme yakin bahwa penghargaan pada kemajemukan, pada pohon-pohon zaitun yang boleh tumbuh bersama-sama tanpa dominasi salah satunya, akan menjawab ketegangan antar kebudayaan yang tidak usah selalu berarti budaya-budaya besar seperti yang dilukiskan Huntington.

Dengan memperhatikan empat alasan mendasar pentingnya multikul-

turalisme di atas, perlu kiranya agar pengalaman Pendidikan Agama (multikultural) relevan dengan keragaman kultural masyarakat dan siswa. Dan para insan pendidik harus merefleksikan dan menghubungkannya dengan pengalaman dan perspektif kehidupan keagamaan siswa yang partikular. Kebutuhan ini mencerminkan fakta bahwa proses belajar-mengajar dalam Pendidikan Agama akan lebih efektif ketika gagasan-gagasan baru berkaitan secara organik dengan pengetahuan terdahulu dan awal yang diajarkan lewat cara-cara yang familiar bagi siswa.

Karakteristik PABM

Pendidikan multikultural untuk konteks Indonesia kontemporer adalah hal yang baru. Sebagian pakar menyebut proses ini sebagai sebuah gerakan reformasi sekaligus inovasi di dunia pendidikan. Pendidikan multikultural umumnya menegaskan perlunya pembelajaran tentang berbagai hal untuk masyarakat yang beragam. Para penganjur pendidikan multikultural memandang penting untuk memperhatikan faktor keragaman kelompok kultural dalam masyarakat yang perlu dipelajari; ada pula yang memberi fokus pada arena tindakan sekolah sebagai yang utama; dan sebagian lainnya memandang utama perbedaan antara teori dan praktik pendidikan multikultural. Benang merah dari berbagai pendapat di atas adalah adanya kesepahaman mengenai *dari mana* harus memulai dan menekankan pluralitas kultural. Bahkan, perencanaan pendidikan multikultural dalam program

sekolah pun perlu memberi peluang berbagai konsepsi pendidikan multikultural yang diungkapkan dalam proses pembuat kebijakan sekolah daripada hanya menerima satu definisi. Konsepsi pendidikan multikultural memuat nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan merefleksikan berbagai tingkat pemahaman di kalangan sivitas yang terlibat dalam pembuatan kebijakan sekolah. Yang dibutuhkan di sini, sesuai dengan pembahasan tulisan ini, adalah suatu sintesis baru untuk memaknai "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural".

Ada beberapa konsep kunci yang dapat dijadikan pegangan relatif untuk memaknai apa itu PABM. *Pertama*, belajar hidup dalam perbedaan. Selama ini pendidikan konvensional bersandar pada tiga pilar utama yang menopang proses dan produk pendidikan nasional, yakni *how to know*, *how to do*, dan *how to be*. Yang pertama menitikberatkan pada proses belajar-mengajar itu sendiri, yakni pendidikan sebagai suatu cara mengajarkan bagaimana siswa belajar secara benar dan baik menurut ukuran-ukuran tertentu yang disepakati; yang kedua berarti sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mengajarkan siswa cara melakukan sesuatu atau pembekalan keterampilan-

pilar-keterampilan hidup (*life skills*) secara lebih luas; dan terakhir menekankan cara menjadi "orang" sesuai dengan kerangka pikir siswa. Meski pada pilar kedua disampaikan keterampilan hidup, namun lebih berkaitan dengan bekal keahlian masing-masing disiplin yang ditekuni siswa. Pendidikan konvensional belum secara mendasar mengajarkan sekaligus menanamkan "keterampilan hidup bersama" dalam komunitas yang plural secara agama, kultural dan etnik. Di sinilah signifikansi hadirnya pilar keempat untuk melengkapi tiga pilar lainnya, yaitu *how to live and work together with others*.

Penanaman pilar keempat—sebagai suatu jalinan komplementer terhadap tiga pilar lainnya—dalam praktik pendidikan meliputi proses:

1. Pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati yang merupakan prasyarat esensial bagi keberhasilan koeksistensi dan proeksistensi dalam keragaman agama. Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin untuk *kerasan* bersama orang lain yang berbeda secara hakiki meskipun terdapat konflik dengan pemahaman Anda tentang apa yang baik dan jalan hidup yang layak.⁶ *Kerasan* lebih dari sekadar menerima sesuatu, namun juga yakin bahwa ada

⁶ Friedmann Schulz von Thun, "Let's Talk: Ways Toward Mutual Understanding", dalam Muhammad Ali et.al. *The End of Tolerance* (London: Nicholas Brealey Publishing, 2002), hlm. 84-85. Toleransi adalah konsep yang mendua. Toleransi tidak diragukan lagi merupakan salah satu kebijakan fundamental demokrasi, namun ia memiliki kekuatan ambivalen yang termanifestasi dalam dua bentuk: bentuk solid dan bentuk dekoratif. Menjadi toleran adalah membolehkan/membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, asal-usul, dan latar belakang mereka selalu bermakna menolak membicarakan pada orang lain apa yang harus dilakukan dan bukan keinginan untuk mempengaruhi

banyak jalan menuju Roma dan bahwa tidak semua orang hendak menuju jalan ke Roma.

2. Klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama. Agama-agama saling berdiskusi dan menawarkan suatu perspektif nilai masing-masing yang dapat dipertemukan dengan kepentingan serupa dari agama lain. Nilai-nilai ini pada akhirnya disepakati bersama dan mengalami proses objektivikasi—membumi dan menjadi milik bersama seluruh penganut agama tanpa memandang perbedaan ras dan warna kulit—serta berlanjut pada komitmen untuk dipelihara dan diimplementasikan dalam kehidupan bersama. Etika Global (*global ethic*)⁷ sebagaimana terumus dalam Deklarasi Parlemen Agama-agama Dunia (*The Parliament of the World's Religions*) merupakan salah satu perjumpaan nilai untuk kepentingan bersama umat manusia secara mendunia dalam rangka memecahkan problem bersama ekologis dan kemanusiaan mondial.

3. Pendewasaan emosional. Kebersa-



maan dalam perbedaan bukanlah hal mudah. Kebersamaan membutuhkan kebebasan dan keterbukaan terhadap orang luar (*outsiders*). Tanpa kebebasan dan keterbukaan, kebersamaan dapat menjerumuskan pada simbiosis yang membeleggu; sebaliknya kebebasan dan keterbukaan tanpa merasakan kebersamaan akan menimbulkan keretakan. Kebersamaan, kebebasan, dan keterbukaan harus tumbuh bersama menuju pendewasaan emosional dalam relasi antar dan

mereka untuk mengikuti ide kita dan demi kemajuan tertentu. Toleransi mengundang dialog untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan perbedaan serta ada saling pengakuan. Inilah toleransi solid. Toleransi dekoratif tidak memuat komitmen dan hanya puas dengan dirinya sendiri dan bersamaan dengan itu pasif dalam mempertemukan kebaikan milik mereka dan kita. Lihat Daniel Goeudevert, "Nothing From Nothing: Tolerance and Competition" dalam Muhammad Ali et.al. *The End of Tolerance...* hlm. 44-52

⁷ Untuk lebih jelas tentang etika global ini lihat lebih lanjut dokumen *Declaration toward A Global Ethics by The Parliament of the World's Religions* pada 1993 sebagai hasil kesepakatan seluruh anggota Dewan ini dan dihadiri tidak kurang dari 6500 orang mewakili seluruh agama, sekte, dan denominasi; juga lihat Zakiyuddin Baidhawy, *Dialog Global dan Masa Depan Agama* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), bab II

intra agama-agama.

4. Kesetaraan dalam partisipasi. Pengakuan atas kehadiran dan hak hidup agama-agama memang penting, namun belum cukup untuk memenuhi pilar hidup dan bekerja bersama orang lain. Pengakuan masih membuka kemungkinan adanya superioritas dan inferioritas atau supremasi atas nama agama tertentu terhadap agama lain, misalnya agama-agama monoteistik terhadap agama-agama Timur. Untuk menutup jalan bagi dominasi dan supremasi atas nama agama ini, agama-agama perlu diletakkan dalam suatu relasi dan kesalingtergantungan, dan karenanya bersifat setara. Setiap agama memiliki kesempatan untuk hidup sekaligus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kemanusiaan universal.

5. Kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antaragama. Biarkan kenangan konflik agama-agama pada masa lalu sebagai kaca spion yang sesekali boleh dilihat kembali agar jalan

kendaraan yang kita kemudikan menjadi lurus dan tidak melanggar marka lalu lintas. Kebutuhan kekinian dan kedisiplinan mengajak semua pemeluk agama yang beragam berjabat tangan untuk mengawali hidup dengan kesepakatan bersama untuk bisa hidup bersama secara lebih sehat dan bervisi ke depan. Dalam konteks ini, pemberian bekal keterampilan komunikasi (*communication skills*) pada siswa mendesak dilakukan.

Hasil yang diharapkan dari lima proses tersebut adalah: *pertama* keterampilan berpikir (*thinking skill*), kemampuan mengembangkan relasi antarpersonal dan intrapersonal penganut agama-agama, kapasitas dalam mengatasi isu-isu kontroversial yang disebabkan faktor sentimen, dan atau picu keagamaan secara kreatif, dan mengembangkan empati serta kerjasama antaragama. *Kedua*, rasa saling percaya (*mutual trust*). Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial (*social capital*)⁸ terpenting dalam penguatan kultural

⁸ Istilah *social capital* kali pertama digunakan oleh Lyda Judson Hanifan pada 1916 untuk menjelaskan pusat-pusat komunitas sekolah pedesaan, dalam karyanya, "The Rural School Community Center", *Annual of the American Academy of Political and Social Science* 67 (1916): 130-138. Istilah ini juga digunakan oleh karya klasik Jane Jacob *The Death and Life of Great American Cities* (New York: Vintage, 1961), hlm. 138, di mana ia menjelaskan tentang jaringan-jaringan sosial yang padat yang sudah ada sejak lama, yang dimanfaatkan oleh sistem kebertetangaan masyarakat urban dalam membentuk modal sosial yang mendorong keselamatan publik. Glenn Loury dalam "A Dynamic Theory of Income Differences", dalam *Women Minorities and Employment Discrimination*, P.A. Wallace and LeMund, eds. (Lexington: Lexington Books, 1977) dan Ivan Light dalam *Ethnic Enterprise in America* (Berkeley: University of California Press, 1972), menggunakan istilah ini pada dekade 70-an untuk menganalisis problem perkembangan ekonomi kota pedalaman: orang-orang Amerika keturunan Afrika kurang memiliki ikatan saling percaya dan keterkaitan sosial didalam komunitas mereka, tidak sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Amerika keturunan Asia dan kelompok-kelompok etnik lainnya. Karenanya perkembangan bisnis orang-orang kulit hitam sangat kecil. Pada dekade 80-an, istilah ini digunakan secara luas oleh James S. Coleman

masyarakat madani.⁹ Modal sosial adalah sumbangan-sumbangan kultural akumulatif yang memudahkan dukungan terhadap tugas-tugas sosial tertentu dalam pembentukan masyarakat madani. Di samping rasa saling percaya, sumber-sumber non material di dalam masyarakat ini bisa berupa status, niat baik, kemerdekaan warga negara, toleransi, dan penghormatan pada aturan hukum, norma-norma, jaringan-jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi sosial dengan memudahkan tindakan-tindakan yang terkoordinasi yang bisa diakumulasi oleh agen-agen sosial. Modal sosial ini merupakan fondasi bagi terbangunnya sikap rasional, tidak mudah curiga, bebas dari prasangka dan stereotif baik yang dikonstruks secara sosial-kultural maupun

secara politik. Agama diyakini sebagai faktor penting dalam pembentukan budaya dan etnisitas. Karena proses internalisasi dan eksternalisasi yang berjalan dalam jangka waktu lama, sering terjadi identifikasi kultural dan etnisitas atas nama agama, dan sebaliknya. Ini bisa menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya "prasangka" tertentu antarkelempok agama yang mungkin ditanamkan dan diwariskan secara sadar maupun tidak sadar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Merasa harus "hati-hati" untuk melakukan kontrak, transaksi, hubungan, dan komunikasi dengan *outsider* (agama dan penganut lain), memperkuat intensitas kecurigaan yang dapat mengarah pada ketegangan, friksi, dan konflik

dalam "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology* supplement 94 (1988):95-120, dan Robert Putnam dalam *Making Democracy Work* (1993). Putnam berjasa dalam merangsang perdebatan intens tentang peran modal sosial dan masyarakat madani di Itali dan Amerika Serikat

⁹ Modal sosial, yang analog dengan modal ekonomi dan modal simbolik, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama para anggota suatu kelompok masyarakat yang mendorong terjadinya kerjasama satu dengan yang lain. Bila anggota-anggota kelompok berharap agar orang lain berlaku tanggung jawab dan jujur, maka mereka akan saling percaya satu dengan yang lain. Namun demikian tidak semua nilai-nilai dan norma-norma bersama itu dapat menjadi modal sosial karena nilai-nilai dan norma-norma tersebut bisa jadi salah. Norma-norma yang memproduksi modal sosial secara substantif harus menonjolkan kebaikan-kebaikan seperti menyampaikan kebenaran, mempertemukan kewajiban-kewajiban, dan resiprositas. Norma-norma semacam ini misalnya, dapat dijumpai dalam nilai-nilai kaum puritan sebagaimana dalam karya Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Modal sosial ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang membuat upaya ke arah penguatan masyarakat madani menjadi mungkin. Sumber-sumber daya kultural ini pada gilirannya bisa membantu perkembangan demokrasi melalui organisasi sosial yang disebut masyarakat madani. Lihat Francis Fukuyama, "Social Capital" dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington, eds. *Culture Matters: How Values Shape Human Progress* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 98-111

antaragama. Pendidikan multikultural menggaribawahi perlunya pencerahan melalui penanaman *mutual trust* antaragama, antarkultur, dan antaretnik.

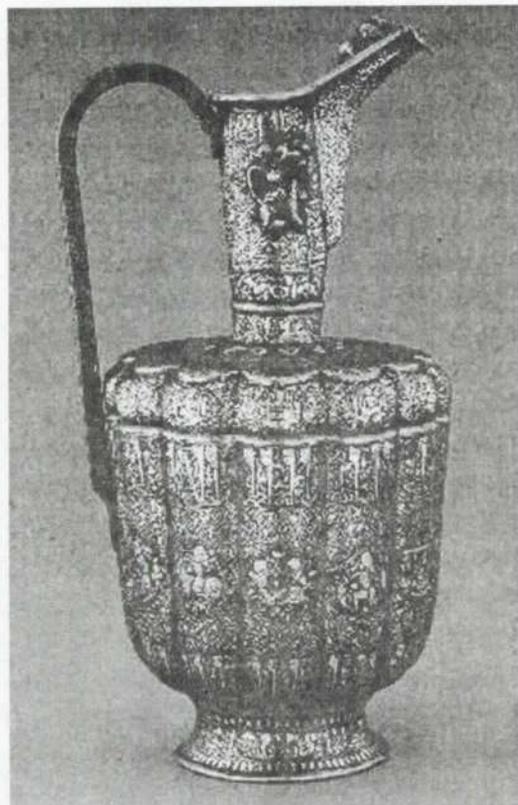
Ketiga, saling memahami (*mutual understanding*). Memahami bukan serta merta berarti menyetujui. Sebagian orang merasa takut jika mereka mencoba secara jantan dan cinta untuk memahami sudut pandang orang lain, itu artinya mereka telah menciptakan kesan yang salah bahwa memahami sama dengan bersimpati pada sesuatu/seseorang. Saling memahami adalah kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita dapat berbeda dan mungkin saling melengkapi serta memberi kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup, sehingga oposan merupakan mitra yang saling melengkapi dan kemitraan menyatukan kebenaran-kebenaran parsial dalam suatu relasi.

Keempat, sikap saling menghargai (*mutual respect*). Sikap ini mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada superioritas maupun inferioritas. Menghormati dan menghargai sesama manusia adalah nilai universal yang dikandung semua agama di dunia. PABM menumbuhkembangkan kesadaran bahwa kedamaian mengandaikan saling menghargai antarpenganut agama-agama, yang dengannya kita dapat dan siap untuk mendengarkan suara dan perspektif agama lain yang berbeda; menghargai signifikansi dan martabat semua individu dan kelompok keagamaan yang beragam. Untuk menjaga kehormatan dan harga diri tidak harus diperoleh dengan mengorbankan

kehormatan dan harga diri orang lain, apalagi dengan menggunakan sarana dan tindakan kekerasan. Saling menghargai membawa pada sikap saling berbagi di antara semua individu dan kelompok.

Kelima, terbuka dalam berpikir. Kematangan berpikir merupakan salah satu tujuan penting pendidikan. Pendidikan seyogyanya memberi pengetahuan baru tentang bagaimana berpikir dan bertindak, bahkan mengadopsi dan mengadaptasi sebagian pengetahuan baru itu pada diri siswa. Sebagai akibat perjumpaan dengan dunia lain—agama-agama yang beragam—siswa diarahkan pada proses pendewasaan dan memiliki sudut pandang, dan banyak cara untuk memahami realitas. Dengan horizon baru inilah siswa terbuka untuk memikirkan kembali bagaimana melihat diri, orang lain dan dunia. Siswa menemukan diri dan kultur baru dengan pikiran baru yang terbuka. PABM mengondisikan siswa untuk berjumpa dengan pluralitas pandangan dan perbedaan radikal yang menantang identitas lama dan segalanya mulai tampak dalam sinar baru. Hasilnya adalah kemandirian untuk memulai pendalaman tentang makna diri, identitas, dunia kehidupan, agama, dan kebudayaan diri sendiri dan orang lain.

Keenam, apresiasi dan interdependensi. Standar hidup yang layak hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana orang saling menunjukkan apresiasi dan memelihara hubungan sosial yang rekat. Orang tidak dapat merasa aman tanpa ikatan sosial. Uang dapat



membeli apapun, tapi pengangguran, sakit, ketidakmampuan, duda/janda, lanjut usia, atau kekurangan lainnya memerlukan lebih dari sekadar uang sebagai solusi. Perlu tanggung jawab untuk mencipta bersama sebuah masyarakat yang membantu semuanya. Perlu adanya tatanan sosial yang harmoni dan dinamis yang saling terkait mendukung individu-individu, dan bukan memecah belah mereka. Tatanan ini melihat kerjasama sebagai hal penting bagi kesehatan masyarakat yang pada gilirannya memberi kesejahteraan bagi individu. Dengan demikian, Pendidikan Agama perlu membagi kepedulian tentang apresiasi dan

interdependensi umat manusia dari berbagai tradisi agama-agama.

Ketujuh, resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Konflik antaragama adalah kenyataan yang tak terbantahkan dari masa lalu dan masa kini kita. Namun, konflik ini harus dikurangi sedemikian rupa karena dengan satu atau lain alasan. Konflik berarti menganggangi nilai-nilai agama tentang persaudaraan dan persatuan universal umat manusia (*unity of humankind*). Dalam situasi konflik, Pendidikan Agama harus hadir untuk menyuntikkan spirit dan kekuatan agama sebagai sarana integrasi dan kohesi sosial. Ia juga menawarkan angin segar kedamaian dan perdamaian. Dengan kata lain, Pendidikan Agama perlu memfungsikan agama sebagai satu cara dalam resolusi konflik. Resolusi konflik belum cukup tanpa rekonsiliasi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan (*forgiveness*). Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik. Pendidikan Agama perlu meyakinkan bahwa agama-agama sesungguhnya mengajarkan bahwa "balasan untuk suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Tetapi, jika seseorang memberi maaf dan melakukan rekonsiliasi, balasannya adalah dari Tuhan." Memaafkan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, perbuatan salah dan dosa yang dilakukan orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja, seperti mencera melalui lisan, mengambil atau merampas hak milik Anda. Memaafkan itu ada dua

macam, *pertama*, memaafkan ketika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pembalasan. Memaafkan semacam ini pada dasarnya serupa dengan kesabaran dan menahan diri, dan bukan memberikan maaf. *Kedua*, memaafkan ketika kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan balas dendam. Memaafkan semacam inilah yang dikehendaki agama manapun di dunia.

Berangkat dari paparan enam konsep kunci di atas, dapat ditarik benang merah bahwa PABM adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesederajatan, saling percaya, saling memahami dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, yang terjalin dalam suatu relasi dan interdependensi, dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan perspektif agama-agama, dalam satu dan lain masalah dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik dalam mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengamunan dan tindakan nirkekerasan.

Beberapa Asumsi Kunci

Pendidikan Multikulturalisme dibangun atas dasar asumsi-asumsi khas yang merupakan kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) dari konsep pendidikan sebelumnya. Dari sudut pandang paradigmatis misalnya, ketika pendidikan multikultural menetapkan pilar keempat dalam filosofi pendi-

dikan, yakni *how to live and work together with others*, bukan berarti ia berdiri-sendiri. Namun demikian, ia bersama pilar-pilar lainnya membentuk suatu jejalin-ikatan yang bersifat sirkuler dan komplementer. Pilar keempat memberikan tekanan tertentu pada cara mengajarkan interaksi sosial dalam kesetaraan dalam masyarakat plural. Pada hakikatnya, apa yang digaris-bawahi oleh pilar keempat ini merupakan refleksi dari kenyataan hidup manusia di mana proses diversifikasi dan diferensiasi semakin terbuka dan menguat, meskipun kecenderungan homogenisasi di bawah panji globalisasi juga sama-sama kokohnya. Dengan demikian, pilar ini lebih menegakkan suatu sistem pendidikan berbasis realitas (*reality-based education*). Dari sudut pandang keagamaan, pendidikan multikulturalisme mencoba memperluas dan melanjutkan dua sikap terhadap “*the other*” yang telah dikembangkan, yaitu inklusif dan pluralis. Pendidikan multikulturalisme menekankan pada upaya penanaman dan penumbuhkembangan kedewasaan dalam menghadapi pluralisme dan multikulturalisme—yang muatannya meliputi multi-religi, multikultural, multietnik, relasi gender, dan multiideologi. Dalam serbamulti tersebut tercakup dua ruang lingkup kesadaran multikultural baik eksternal dan internal: *antar* dan *intra*. Pada tingkat yang lebih kompleks, kesadaran multikultural bisa meliputi berbaurnya berbagai identitas dalam individu atau kelompok tertentu. Seseorang beridentitas keagamaan Muslim misalnya, pada saat yang sama ia

menyandang identitas etnik tertentu (Jawa, misalnya, dengan kultur Jawa Pesisir), dengan menyandang identitas seksual tertentu, boleh jadi transeksual dan sebagainya. Multikulturalisme ini membuka kemungkinan terbentuknya hibriditas identitas kultural dan keagamaan. Kompleksitas kehidupan serbamulti itu menjadi basis pengembangan sistem pendidikan multikultural.

Oleh karena itu, sebagai sebuah tawaran baru dalam konteks Indonesia kontemporer, PABM memiliki beberapa asumsi pokok yang menjadi karakteristiknya. Berikut ini beberapa asumsi kunci yang menjadi tinanda dari nomenklatur pendidikan multikultural, dengan tekanan khusus pada Pendidikan Agama.

1. PABM dialamatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional akan pendidikan yang secara berkesinambungan merepresentasikan keanekaragaman wajah agama dan perjumpaannya dalam kesetaraan dan harmoni.

Wacana dan praktik pendidikan agama semacam ini menekankan multikulturalisme sebagai suatu kemungkinan dan kesempatan untuk saling belajar tentang, mempersiapkan untuk, dan merayakan pluralitas agama dan etnik serta kultural melalui dunia pendidikan. Dengan demikian, ini menuntut suatu *inovasi dan reformasi pendidikan agama* sebagai upaya perubahan sosial, setidaknya pengarah atau pemandu proses perubahan sosial.

Tentu saja upaya ini menghendaki pemikiran mendalam dan kritis, serta komitmen pada masa depan generasi mendatang, dan memperhatikan kekayaan semua kisah perjuangan dari berbagai lapisan masyarakat multiagama. Asumsi inovasi dan reformasi tersebut menunjukkan aspek dari perjalanan kemanusiaan dan keagamaan yang berkesinambungan menuju keadilan dan menekankan pada pemenuhan keberagaman demokratis. Masyarakat dan siswa dididik untuk berusaha menjadi lebih manusiawi bukan hanya melalui pikiran keagamaan kritis, tetapi juga mampu berimajinasi tentang kenyataan dari harapan-harapan agama dan religiusitas mereka. Jadi, pendidikan agama merupakan suatu pelabuhan bagi keragaman suara dalam masyarakat multiagama dan tempat mempertemukan impian-impian berbagai agama agar menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, PABM perlu melakukan inovasi dan reformasi dalam beberapa wilayah utama, yakni:

A. Integrasi muatan dan bahan ajar dengan memasukkan materi-materi, konsep-konsep, dan nilai-nilai dari berbagai agama dalam pembelajaran dengan maksud agar siswa dapat melihat perbedaan (*differences*) dan persamaan (*similarities*) dalam agama-agama, sekaligus untuk mengenal keunikan (*uniqueness*)¹⁰ masing-masing. Mengetahui perbedaan antar agama-agama tanpa diiringi

¹⁰ Lihat Joachim Wach, *Comparative Study of Religions* (New York and London: Columbia University Press, 1958), khususnya bab II tentang perkembangan, makna, dan metode Studi Perbandingan Agama.

pemahaman mengenai persamaan-persamaan dan titik temu dapat membawa pada rasa curiga yang makin kuat di kalangan para penganutnya dan sudah tentu tidak mungkin ada sinergi dalam bentuk kerjasama. Hanya mengerti persamaan dan titik temu di antara agama-agama juga bisa mereduksi keberbedaan agama-agama dan pada gilirannya memandang "semua agama sama" dan sinkretik. Sebagai pemahaman komprehensif, agama-agama perlu dilihat pula keunikannya yang tidak mungkin dimiliki agama lain. Di sinilah letak pentingnya integritas tanpa harus mengorbankan keunikan agama lain. Keunikan-keunikan adalah modal untuk saling berlomba dalam kebaikan. Perbedaan-perbedaan berfungsi untuk mempertegas jati diri, dan persamaan-persamaan merupakan titik pangkal untuk kolaborasi. Tiga ranah ini hanya dapat dilihat secara jernih apabila Pendidikan Agama dengan pendekatan multikultural menggunakan analisis perbandingan. Untuk dapat menjalankan inovasi analisis perbandingan ini dibutuhkan beberapa persiapan dan perlengkapan yang memadai terutama bagi pengajar antara lain: 1) kelengkapan intelektual. Tidaklah mungkin ada harapan untuk memahami suatu agama atau fenomena keagamaan tanpa informasi luas dan memadai. 2) keberhasilan dalam mempelajari suatu agama yang berbeda dari yang kita miliki

menghendaki prasyarat emosional yang cukup, yakni keterlibatan perasaan, minat, *metexis*, atau partisipasi. Namun bukan berarti bahwa agama merupakan urusan emosi semata. Maksudnya, agama merupakan suatu wilayah kepedulian pribadi secara total, melibatkan intelek, emosi, dan kehendak sekaligus.

B. Konstruksi pengetahuan baru yang mengakui bahwa semua pengetahuan apapun sebenarnya dibangun secara sosio-kultural, diciptakan oleh pikiran manusia untuk menjelaskan pengalaman, dan karenanya dapat dikritik. Pun juga menerima masukan untuk penyempurnaan dan senantiasa mengalami perubahan. Konstruksi pengetahuan ini merupakan aspek utama dalam pendidikan multikultural, karena guru dapat secara efektif mengajarkan agama dengan khazanah multikultural bila ia telah merekonstruksi pandangan dunianya sendiri.

C. Pedagogi dalam persamaan terlibat ketika guru mengubah cara mengajar dengan mengakomodasi berbagai perbedaan agama-agama dari siswa untuk merangsang capaian dan prestasi akademik.

D. Reduksi prasangka buruk (*prejudice*) dan rasisme dapat memasukkan pengajaran tentang toleransi terhadap agama-agama.¹¹ *Prejudice* termasuk di dalamnya diskriminasi, etnosentrisme,

¹¹ Secara tradisional *prejudice* dipahami sebagai orientasi negatif terhadap anggota kelompok tertentu; buruk dan tidak dibenarkan; irasional dan salah; serta kaku. Irasional karena prasangka tidak berhubungan dengan realitas sosial orang yang mempersepsi; salah karena pandangan semacam itu merupakan hasil

favoritisme *in group*, bias *in group*, penghinaan terhadap *out group*, antagonisme sosial, stereotip, dan kesenjangan sosial. Terma ini merujuk pada segala perilaku dan sikap negatif terhadap seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu.

Pewarisan dan perkembangan prasangka atas nama apapun sudah terjadi sejak masa kanak-kanak. Setidaknya, penanaman dan pertumbuhan prasangka dapat terjadi melalui empat cara. *Pertama*, kesalahan dalam penyesuaian emosional (*emotional maladjustment*). Biasanya, prasangka ini berhubungan erat dengan perkembangan tipe kepribadian tertentu, kepribadian otoriter.¹² Prasangka pada anak-anak berasal dari *emotional maladjustment* yang muncul dari pendidikan dan

asuhan disiplin yang keras dan represif. Dalam lingkungan semacam ini, anak-anak merasakan frustrasi, kemarahan, dan permusuhan terhadap orang tuanya, dan biasanya akan mencari kambing hitam terhadap mereka yang lebih lemah dan kurang kuat, misalnya terhadap anggota kelompok minoritas, termasuk minoritas agama.

Kedua, prasangka pada anak-anak adalah refleksi dari sikap dan nilai-nilai komunitasnya yang secara tipikal ditransmisikan kepada mereka oleh orang tuanya.¹³ Cara ini bisa saja berasal dari literatur-literatur yang menjadi bacaan anak-anak selama bertahun-tahun; anak-anak mempelajari sikap mereka terhadap agama dan etnik tertentu baik melalui latihan dan pengamatan langsung atau

dari distorsi pengetahuan sebagai akibat keterbatasan proses informasi, pengaruh *mood*, dan disfungsi kepribadian; buruk karena konsekuensi dari sikap ini dapat mengancam orang lain; dan kaku karena kepercayaan bahwa orang-orang yang diprasangkakan sulit mengubah pandangan mereka. Definisi ini menampakkan dimensi pejoratif dari prasangka. Sementara ada definisi *prejudice* yang relatif netral, yakni seperti favoritisme atau bias *in group*, sikap senang dan tidak senang, rasa suka-menolak, percaya-tidak percaya dan suka-tidak suka. Bila *prejudice* biasanya dipandang sebagai fenomena individual, rasisme adalah konstruk yang lebih luas yang menghubungkan kepercayaan dan praktik individu dengan norma dan praktik sosial dan institusional yang lebih luas. Rasisme kontemporer menjustifikasi dan melegitimasi perbedaan antara kelompok, bukan atas dasar biologi dan warna kulit, namun atas klaim bahwa kelompok tertentu melanggar nilai-nilai sosial fundamental seperti etika kerja, *self-reliance*, disiplin diri, dan capaian individu. Definisi dan penjelasan lebih lengkap lihat Martha Augoustinous dan Katherine J. Reynolds, "Prejudice, Racism, and Social Psychology", dalam Martha Augoustinous dan Katherine J. Reynolds, eds. *Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict* (London: Sage Publication, 2001), hlm. 1-23

¹² Lihat T.W. Adorno et.al. *The Authoritarian Personality* (New York: Harper, 1950)

¹³ Lihat D.R. Kinder dan D.O. Sears, "Prejudice and Politics: Symbolic Racism versus Racial Threats to the Good Life", dalam G. Lindzey dan E. Aronson, eds. *Handbook of Social Psychology* Vol. 2 (New York: Random House, 1981): 659-741

meniru perilaku verbal dan non-verbal orang tuanya. Anak-anak sejak umur 3-4 tahun telah mulai mengembangkan kesadaran tentang relasi antarkelompok dalam komunitasnya.

Ketiga, sikap anak-anak terhadap kelompok lain tergantung pada tingkat perkembangannya berkaitan dengan dua sekuens perkembangan persepsi-kognitif, yaitu:¹⁴

a. Melibatkan proses yang mendominasi pengalaman anak-anak dalam waktu tertentu. Pada awalnya, anak-anak didominasi oleh proses persepsi-afektif berhubungan dengan ketakutan akan sesuatu yang tidak dikenal dan kedekatan dengan sesuatu yang familiar. Proses persepsi ini selanjutnya mendominasi preferensi atas *in group* dan menolak *out group* yang ditentukan oleh sifat-sifat fisik seperti warna kulit, ukuran tubuh, bahasa, agama, dan sebagainya.

b. Berkaitan dengan perubahan dalam fokus perhatian anak-anak. Sementara anak-anak yang masih kecil banyak memfokuskan pada diri sendiri dan preferensi serta persepsinya, anak-anak yang lebih besar menekankan kategori individu dipandang sebagai anggota dari kategori atau kelompok tersebut. Bias *in group* dan prasangka *out group* semakin

kuat pada umur 7 tahun ketika perbedaan antarkelompok semakin dapat dipahami.

Keempat, prasangka dan diskriminasi terhadap anggota *out group* etnik yang berasal dari keinginan individu untuk mengidentifikasi dengan kelompok sosial yang dipandang secara positif berbeda atau secara komparatif superior dari kelompok lainnya, dengan tujuan untuk memperluas harga-dirinya.¹⁵ Konsekuensi dari identifikasi kelompok ini adalah bahwa anggota *in group* dipersepsi serupa dan memiliki kualitas positif dan melahirkan bias positif; sebaliknya anggota *out group* dipandang berbeda dan memiliki kualitas yang kurang bagus dan menarik munculnya prasangka dan diskriminasi.

Rasisme adalah keyakinan tentang superioritas suatu ras atas ras lainnya dan perilaku yang mempertahankan posisi superior dan inferior. Reduksi atas prasangka dan rasisme ini hanya dapat dilakukan melalui pentingnya menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan. Sikap toleran dapat dikembangkan dalam beberapa tingkatan, yakni: toleran pada tingkat minimal adalah merespons seperangkat kepercayaan dan praktik yang dipandang menyimpang tanpa campur tangan melalui paksaan; toleran adalah menentang godaan untuk menggunakan keke-

¹⁴ Misalnya karya F.E. Aboud, "Interest in Ethnic Information: A Cross-Cultural Development Study", *Canadian Journal of Behavioral Science*, 9 (1980):195-209; dan *Children and Prejudice* (Oxford: Basil Blackwell, 1988)

¹⁵ Lihat misalnya karya R.J. Brown, *Prejudice: Its Social Psychology* (Oxford: Blackwell, 1995)

rasan, tindakan paksaan terhadap individu atau kelompok yang dipandang tidak benar; dan toleran dalam bentuknya yang paling sempurna adalah melampaui celaan dan bahkan melampaui ketidakberbedaan yang halus, suatu sikap yang menghargai dan mempertahankan hak-hak orang lain. Para pendukung toleransi pada tingkat ini percaya bahwa mereka secara prosedural telah mengambil manfaat dari proses memberi dan menerima serta saling kritik antaragama secara terbuka, dan secara substantif dari pandangan dan pengetahuan baru yang diperoleh dalam dialog. Kaum pluralis mempraktikkan bentuk toleransi tertinggi, sedangkan kelompok eksklusif menunjukkan toleransi minimal, membiarkan tapi tidak menguatkan keragaman. Sedangkan bagi kaum inklusif, toleransi adalah sikap dan perilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum daripada dipandang sebagai kebaikan dalam dirinya sendiri.

E. Penyerahan akan bias dalam masyarakat. Bias tidak hanya terjadi atas dasar kebudayaan atau ras, tapi juga atas dasar kelas sosial, agama, atau kemampuan fisik dan mental. Inovasi dan reformasi pendidikan multikultural membantu siswa agar lebih sensitif terhadap isu-isu bias dan mengembangkan keterampilan anti bias. Pengajaran kelas perlu memperkenalkan konsep anti bias, namun bukan berarti menghapus atau menghilangkan semua materi "yang bias" dalam pengajaran. Biarkan siswa mempunyai kesempatan

untuk membicarakan dan memikirkan tentang semua isu bias itu. Ini akan menolong mereka mengembangkan pemikiran kritis yang diperlukan untuk mengidentifikasi bias. Ia juga membantu mereka menjadi lebih peka dan memahami perasaan orang yang menderita karena bias tersebut. Siswa-siswa yang didiskriminasi juga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tentang bagaimana merespons ketika bias menimpa mereka. Karena dunia terus berubah, kita harus terus menganalisis bias yang berkembang dalam masyarakat.

F. Melihat dan menguji kembali struktur pendidikan agama dan pendidikan umum dengan maksud agar sekolah mampu mendorong perkembangan semua siswa.

2. Secara empirik, identitas agama dapat ditransformasi menjadi identitas etnik dan kultural dalam waktu yang panjang.

Suatu agama sering memulainya sebagai kredo abstrak dengan tampilan dan ruang lingkup universal. Dalam generasi-generasi berikutnya, agama menjadi lebih konkret sebagai seperangkat liturgi dan praktik yang terbatas pada komunitas dan wilayah tertentu. Kemudian agama mengkristal menjadi seperangkat ritual dan kebiasaan yang lebih konkret yang membedakan komunitas tertentu dari komunitas lainnya. Komunitas agama menjadi komunitas etnik dan kultural. Dalam banyak kasus, agama adalah etnisitas, identitas agama meru-

pakan unsur utama pembentuk identitas etnik. Dalam berbagai situasi, yang membedakan kelompok-kelompok adalah perbedaan agama dalam pola budaya serta peran sosial yang berasal dari agama. Memperhatikan kenyataan demikian, PABM mengasumsikan perlunya *identifikasi dan pengakuan akan eksistensi agama-agama, termasuk etnik dan budaya*. Identitas manusia seperti dinyatakan Charles Taylor, sebagian dibentuk oleh pengakuan atau ketiadaannya, sering juga oleh salah pengakuan, sehingga person atau kelompok orang dapat mengalami penderitaan dan distorsi, jika orang atau masyarakat yang mengelilinginya berkaca kembali pada mereka untuk menjelaskan atau mendapat gambaran tentang diri mereka sendiri.¹⁶

3. PABM tidak semata membuka kesempatan yang sama atas identifikasi dan pengakuan agama-agama—termasuk etnik dan budaya—bahkan juga merupakan sarana yang memfasilitasi penyediaan ruang dan waktu publik bagi perjumpaan lintas agama, lintas kultural, dan lintas etnik.

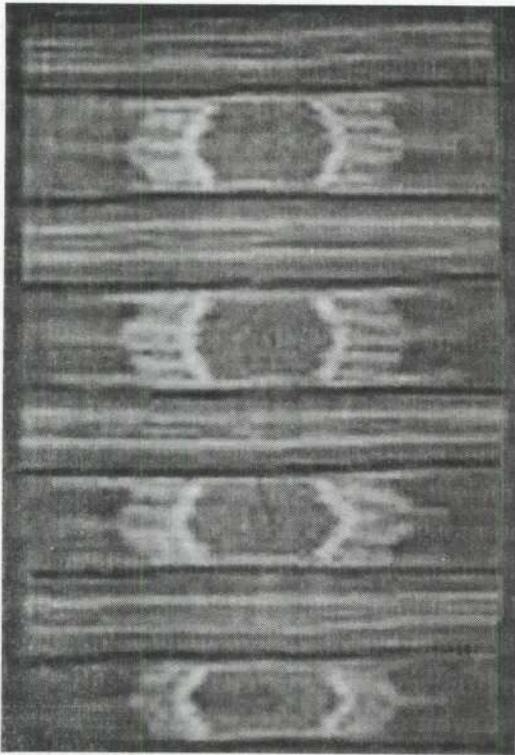
Melalui perjumpaan ini, agama-agama dapat saling berbagi dan melintas batas untuk melihat batasnya sendiri; menamakan dan menumbuhkembangkan

perspektif keagamaan multikulturalis kepada para penganutnya; serta memberi kontribusi bagi pemberdayaan ko-eksistensi bahkan pro-eksistensi antaragama dan intraagama.

4. Kesadaran bahwa hidup manusia hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana orang saling memelihara hubungan sosial yang kokoh.

Dapatkah orang merasa aman tanpa ikatan sosial? Uang dapat membeli apapun, tapi pengangguran, sakit, ketidakmampuan, duda/janda, lanjut usia, atau kekurangan lainnya memerlukan lebih dari sekadar uang sebagai solusi. Hak ini menuntut agar orang bertanggung jawab satu dengan yang lain, agar mereka menciptakan bersama sebuah masyarakat yang membantu semuanya. Sejalan dengan pilar *how to live and work together with others*, PABM menekankan kesadaran mengenai interdependensi antaragama dan antarmasyarakat. Tatanan sosial yang saling terkait mendukung dan mengikat individu-individu dari berbagai penganut agama-agama dan bukan memecah-belah mereka. Tatanan ini melihat kerjasama sebagai hal penting bagi kesehatan masyarakat agama-agama yang pada gilirannya memberi kesejahteraan bagi seluruh manusia.

¹⁶ Charles Taylor, *Multiculturalism and the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1992), hlm. 25



5. Mengajar dan belajar adalah proses kultural yang terjadi dalam konteks sosial.

Agar pengajaran dan belajar lebih dapat diakses dan sama terbuka bagi berbagai siswa, maka kebudayaan termasuk agama para siswa harus lebih dipahami. Pemahaman semacam ini dapat dicapai dengan menganalisis proses pendidikan dari berbagai perspektif kultural sehingga

dapat menanggalkan kebutaan yang menekankan pendidikan pada pengalaman budaya dominan. PABM mengandai-kan suatu pengajaran efektif (*effective teaching*) dan belajar aktif (*active learning*)¹⁷ dengan memperhatikan keragaman agama-agama siswa. Dalam hal ini, proses mengajar lebih menekankan pada bagaimana mengajarkan *tentang* agama, bukan mengajarkan agama. Karena yang pertama melibatkan pendekatan kesejarahan (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sedangkan yang kedua melibatkan indoktrinasi dogmatik pada siswa, sehingga secara praktis ia tidak memberikan sarana yang memadai untuk menentukan pelajaran/kuliah mana yang dapat diterima dan mana yang perlu ditolak. Apakah seorang guru mengajarkan agama atau mengajarkan *tentang* agama sering tergantung pada *bagaimana* pandangan-pandangan keagamaan diajarkan. PABM, tentu saja, menitikberatkan proses pengajaran pandangan keagamaan multikulturalis. Perbedaannya dengan pandangan keagamaan eksklusif, inklusif dan pluralis dapat dilihat pada tabel I. Pendidikan Agama bukan sarana bagi guru untuk mempromosilitisasi pandangan keagamaan siswa

¹⁷ *Active learning* adalah cara belajar dengan melibatkan kesiapan mental dan tindakan siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar siswa melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan mereka. Mereka menggunakan otak mereka, mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung dan secara pribadi menarik hati. Lihat Mel Silberman, *Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject*, terj. Sardjuli et.al. (Yogyakarta: Yappendis, t.th), bab pendahuluan

apalagi memproselitisasi agama mereka. Guru penganut suatu agama yang meyakini hanya ada satu kebenaran, tertutup kemungkinan untuk menerima validitas kepercayaan alternatif dan gagal mengajarkan toleransi dan saling menghargai. Disamping itu, proses pembelajaran juga perlu memberi kesempatan pada siswa untuk aktif mencari, menemukan, dan mengevaluasi pandangan keagamaannya sendiri dengan memperbandingkannya dengan pandangan keagamaan siswa lainnya, dan atau dengan penganut agama-agama di luar dirinya.

6. Interaksi dalam kelas antara guru dan siswa merupakan bagian terbesar dari proses pendidikan bagi semua siswa.

Karena multikulturalisme menghendaki perjumpaan dalam keragaman, maka pendidikan multikultural mengkondisikan relasi guru-siswa yang produktif dan efektif. Relasi antarmanusia secara intensif ini dapat melatih kemampuan berkomunikasi secara baik, menghadapi perbedaan secara dewasa, bukan melalui pemaksaan kehendak satu atas yang lain, namun ada kesediaan melakukan dialog, *sharing*, negosiasi dan kompromi. Interaksi manusiawi ini dengan sendirinya membiasakan siswa siap belajar berbeda tanpa membawa pada negasi terhadap eksistensi orang lain.

Orientasi Pendidikan

Pendidikan Multikultural bukanlah segalanya bagi semua masyarakat. Beberapa upaya yang dapat ditawarkan secara detail untuk mengembangkan strategi

pendidikan, dengan titik tekan pada Pendidikan Agama, secara luas dapat dicakup dalam beberapa tipologi payung pendidikan multikultural. Masing-masing tipologi menyediakan *frame work* yang bermanfaat untuk memikirkan dan mempraktikkan pendidikan multikultural, memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pendidik dan orang lain apa yang dimaksud dengan istilah pendidikan multikultural tersebut. Berikut ini adalah penjelasan ringkas tentang bagaimana pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dalam Pendidikan Agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Indonesia. Penjelasan ini sangat penting bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan *stakeholders* lain sebagai permulaan untuk melakukan pilihan atas pendidikan multikultural:

1. *Orientasi muatan*. Pendidikan Multikultural dapat dikembangkan dengan menawarkan muatan khas yang dapat dengan segera diakui dalam berbagai varian pendidikan multikultural termasuk dalam Pendidikan Agama. Tujuan utama program berorientasi muatan ini adalah untuk memasukkan materi-materi tentang keragaman kelompok-kelompok kultural, kelompok etnik, dan kelompok keagamaan dalam pendidikan dan subjek pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai keragaman kelompok tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, program ini menambahkan muatan multikultural pada kurikulum standar, barangkali menggabungkan

sedikit bacaan dalam tatap muka kelas, peringatan-peringatan hari kepahlawanan nasional atau hari-hari suci agama-agama. Versi lain dari program berorientasi muatan ini bisa mengambil bentuk pendekatan yang dipergunakan dengan menambahkan sejumlah materi dan tema pada kurikulum. Sebagai sebuah tawaran, muatan kurikulum PABM, lihat Tabel II. Versi kurikulum yang lebih canggih melakukan transformasi dengan tujuan: mengembangkan muatan kurikulum melalui berbagai disiplin ilmu pengetahuan; menggabungkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang beragam dalam kurikulum; dan mentransformasi kanon, utamanya mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum.

2. *Orientasi siswa*. Karena pendidikan multikultural adalah suatu upaya merefleksi pertumbuhan keragaman masyarakat Indonesia dan khususnya keragaman kelas, banyak program bergerak melampaui kurikulum yang ada untuk memenuhi tuntutan akademik tertentu, yakni upaya hati-hati mendefinisikan kelompok-kelompok yang berkembang pada siswa, termasuk kelompok minoritas. Bila program berorientasi muatan berusaha meningkatkan *body of knowledge* tentang berbagai etnik, budaya, agama, dan kelompok-kelompok gender, program berorientasi siswa dimaksudkan untuk meningkatkan capaian akademik dari kelompok-kelompok tersebut, meskipun pada saat itu mereka tidak merasakan dan atau melibatkan diri dalam perubahan ekstensif muatan kurikulum. Program ini

dirancang bukan untuk mentransformasi kurikulum atau konteks sosial pendidikan, tapi untuk membantu secara kultural dan keagamaan para siswa untuk melakukan transisi kedalam *mainstream* pendidikan. Dengan cara ini, program perlu melihat latar belakang kultural dan keagamaan para siswa. Dengan sendirinya, program ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu program yang menggunakan penelitian gaya belajar berbasis kultur keagamaan dalam upaya menentukan cara pengajaran mana yang dapat digunakan untuk kelompok siswa tertentu; program lintas agama; studi bersama antaretnik; studi bersama antaragama; dan studi bersama antargender.

3. *Orientasi Sosial/lingkungan*. Peneakanan program ini pada upaya melakukan reformasi persekolahan (*schooling*) dan konteks kultural serta politik dari persekolahan, yang tujuannya bukan untuk memperluas capaian akademik maupun meningkatkan pengetahuan multikultural, namun untuk memberikan pengaruh luas pada peningkatan toleransi kultural, agama, dan etnik serta mereduksi bias, stereotip, dan prasangka sosial yang tumbuh dan berakar dalam masyarakat. Orientasi program semacam ini meliputi bukan hanya program-program yang didesain untuk merestrukturisasi dan menghilangkan segregasi sekolah-sekolah, namun juga program-program yang dirancang untuk meningkatkan semua bentuk kontak dan perjumpaan (*encounters*) antar agama, antaretnik, dan antar-kultur. Program ini memberikan dukung-

an pada kelompok minoritas dalam sekolah, mengeliminir bias-bias yang tumbuh di kalangan masyarakat dan berimbas pada pergaulan siswa, serta menekankan pada belajar bersama. Tipe orientasi pendidikan semacam ini menekankan relasi antarmanusia dalam semua bentuknya, dan menggabungkan beberapa karakteristik dari dua orientasi lain di atas. Dengan cara ini, pendidikan membutuhkan pembaruan kurikulum dengan maksud untuk menekankan kontribusi sosial yang positif dari setiap kelompok-kelompok agama, etnik, dan kultural.

Tiga orientasi program di muka secara gamblang melukiskan kategori-kategori pendidikan multikultural yang membantu memfasilitasi para pendidik dalam upaya mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang merefleksikan keragaman agama, etnik, dan kultural para siswa. Artikulasi publik program dan tujuan dari pendekatan-pendekatan yang spesifik dapat menolong untuk memperlembut retorika politik di seputar pendidikan multikultural, dan memperhadapkan para pendidik dan pembuat keputusan pada persoalan bersama untuk didiskusikan.

Transformasi sebagai Tujuan

PABM melalui pendekatan progresif mengarahkan seluruh programnya pada transformasi pendidikan dengan mendasarkan diri pada ideal-ideal keadilan sosial dan eliminasi ketidakadilan dan penindasan, persamaan dan kesetaraan dalam

keragaman, menurut sistem nilai yang tercakup dalam agama-agama. Secara fundamental, pendidikan ini diselenggarakan untuk memberikan pengaruh dan arah bagi perubahan sosial melalui tiga jalan transformasi sebagaimana diterangkan berikut ini.

Transformasi Diri

Fondasi psikologis dari PABM menggarisbawahi penekanan pada pengembangan dan transformasi pemahaman tentang kedirian secara lebih luas, konsep diri positif, dan bersahaja pada identitas keagamaannya, identitas kultural dan etniknya. Penekanan pada wilayah kedirian ini merupakan bagian dari tujuan PABM dalam rangka membantu pertumbuhan personal siswa yang meliputi keseluruhan kontribusi pada capaian intelektual, akademik dan sosial. Siswa yang merasa berharga atas dirinya sendiri tampaknya akan lebih terbuka dan menerima interaksi dengan orang lain dan menghargai agama, kebudayaan, dan etnisitas diri dan orang lain. Argumen ini diperkuat dengan klaim tentang relasi resiprokal antara konsep-diri, capaian akademik, etnisitas, agama, kebudayaan, dan identitas individu.

Banyak siswa yang telah melakukan internalisasi konsepsi yang negatif dan distortif tentang kelompok agama, etnik, dan kulturalnya sendiri dan kelompok orang lain, suatu proses yang juga terjadi dalam masyarakat yang lebih luas. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai kelompok keagamaan diri

dan orang lain serta pengalaman kultural dan keagamaan masing-masing dapat meluruskan distorsi yang dimaksud. PABM mendukung para pendidik untuk memenuhi upaya memaksimalkan potensi manusia, pertemuan kebutuhan-kebutuhan individual, dan mengajar semua siswa dengan mengembangkan perasaan harga diri, percaya diri, dan kompetensi diri.

Di samping itu, transformasi diri menyangkut sikap dan perilaku individu terhadap keseluruhan kelompok keagamaan, etnik, dan budaya yang berbasis pada stereotip, prasangka, dan rasisme. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terjangkit penyakit saling curiga, PABM perlu membantu menjelaskan sikap dan nilai-nilai agama-agama. PABM harus menghadapi prasangka, stereotip, dan rasisme secara langsung, melakukan analisis kritis atas berbagai sumber teks keagamaan, ekspresi dan tafsirannya, serta pengaruh negatif dari sikap dan nilai agama-agama, melakukan rekonsiliasi antar berbagai kebenaran agama, dan menawarkan alternatif sikap dan perilaku serta nilai-nilai baru dan positif sembari mengabaikan nilai-nilai lama dan negatif.

PABM juga mempromosikan nilai-nilai inti (*core values*) yang berangkat dari ajaran agama-agama yang menekankan prinsip-prinsip martabat kemanusiaan, keadilan, persamaan, kebebasan bertanggung jawab, dan demokrasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan pada siswa bagaimana cara menghargai dan merangkul pluralitas agama, etnik dan

budaya; berani menyatakan sikap bahwa perbedaan agama-agama tidak sama dengan inferioritas dan kelemahan; dan mengakui keragaman sebagai bagian integral dari kenyataan hidup Indonesia. Penegasan sikap dan nilai-nilai keagamaan ini dirancang untuk membantu siswa memahami bahwa konflik nilai-nilai adalah tak terelakkan dalam masyarakat yang plural secara religi, kultural dan etnik; bahwa konflik tersebut tidak harus menggerogoti dan memecah belah persatuan, dan ketika itu dikelola secara baik dapat menjadi katalisator bagi kemajuan sosial; bahwa ada kekuatan dalam pluralitas agama-agama; bahwa koalisi dan kerjasama antaragama dapat menyulam ragam dan merajut harmoni sosial.

Transformasi Sekolah

Sebagian tujuan utama dari PABM adalah memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa dari berbagai agama, etnik, dan budaya. Ini menjadi penting untuk masa sekarang dan mendatang karena sekolah selama ini belum menjadi pusat persemaian keragaman dan perjumpaannya. Kegagalan masa lalu sekolah terletak pada ketidakmemadaiannya metodologis dan pedagogis dan hanya mengajarkan sejumlah pengetahuan tanpa memperkenalkan kapasitas intelektual dalam memahami keberbedaan. Pendidikan multikultural perlu memperbaiki penguasaan membaca dan menulis, muatan kurikulum, dan keterampilan proses intelektual seperti

problem solving, pemikiran kritis, resolusi konflik, dan rekonsiliasi melalui pembekalan materi dan teknik yang lebih bermanfaat bagi hidup dan menjadi kerangka rujukan bagi siswa-siswa yang beragam secara agama, etnik dan budaya. Dengan mempergunakan limpahan material, pengalaman dan contoh-contoh konflik maupun kehidupan harmoni dalam lintasan sejarah bangsa sebagai konteks untuk mengajarkan, mempraktikkan dan mendemonstrasikan penguasaan akademik dan keterampilan dasar, akan meningkatkan tampilan sarana instruksional, memperluas relevansi praktis dari keterampilan yang dipelajari, dan memperbaiki kesempatan waktu luang siswa untuk melaksanakan tugas mereka.

Aspek lain dari pendidikan multikultural yang memberi kontribusi langsung pada pencapaian tingkat tinggi keterampilan dasar adalah dengan *matching* antara gaya mengajar dan belajar. Dengan

menunjukkan secara gamblang betapa pluralitas dan perbedaan terdapat dalam diri siswa sendiri melalui pembelajaran tentang komunitas kultural mereka, dan bagaimana mereka diharapkan memanfaatkan waktu di sekolah untuk memberikan banyak perhatian pada upaya pengentasan konflik-konflik keagamaan, ini akan memberikan mereka kemampuan teknis pemecahannya. Mengajarkan siswa agar membiasakan diri untuk belajar meminimalkan konflik-konflik dan menyalurkan energi lebih mereka pada tugas-tugas akademik perlu dilaksanakan. Jadi dalam PABM pengajaran dan pembelajaran dikontekstualisasi secara kultural untuk membuat proses pendidikan menjadi lebih efektif bagi keragaman agama-agama, etnik dan budaya mereka, dan inilah prinsip fundamental pendidikan multikultural.

Penciptaan iklim sosial dalam sekolah juga mempengaruhi tampilan akademik.

Pengaruh ini tampak jelas bagi kelompok-kelompok keagamaan atau apapun yang memperhatikan relasi dan *setting* informal yang merupakan imperatif bagi proses belajar. Ketika pendidik merespons kebutuhan semacam ini dengan memasukkan simbol-simbol, citra dan informasi keagamaan dalam dekorasi kelas, muatan kurikulum, dan



interaksi antarpersonal, para siswa dari berbagai agama itu akan memiliki afiliasi lebih besar dengan sekolah. Dengan cara ini akan tumbuh rasa saling memiliki dan rasa saling tergantung antar mereka.

Tujuan lain dari transformasi sekolah adalah persamaan dan egalitarianisme. Transformasi ini berangkat dari kesadaran dan pemahaman bahwa keistimewaan pendidikan tidak dapat dicapai oleh para siswa manapun ketika ada upaya eliminasi terhadap kelompok-kelompok keagamaan, etnik, dan budaya tertentu. Upaya ini dibangun atas dasar gagasan bahwa *sameness* (kesamaan) merupakan kunci untuk menyediakan kesempatan pendidikan secara sama bagi para siswa yang beragam secara agama, etnik, dan budaya.

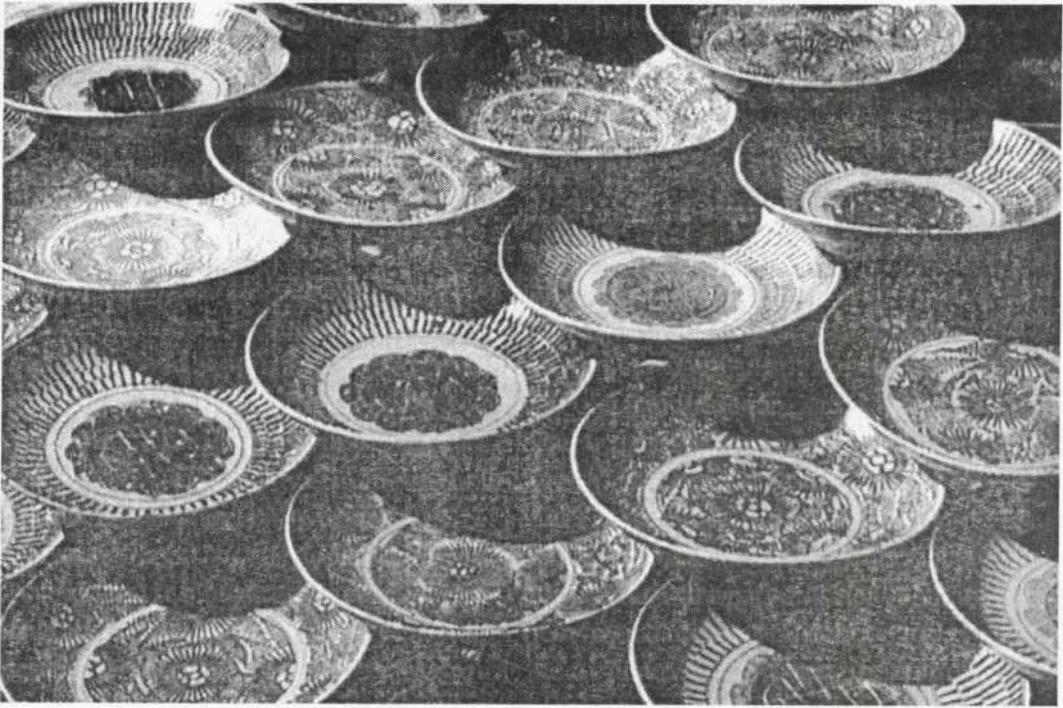
Untuk menentukan kesebandingan kesempatan belajar, para pendidik harus secara komprehensif memahami bagaimana kebudayaan membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan kebijakan pendidikan. Karena itu, mereka perlu mengembangkan berbagai sarana untuk melaksanakan pengajaran bersama yang mencerminkan preferensi dan gaya dari berbagai individu dan kelompok. Dengan memberikan siswa pilihan-pilihan tentang bagaimana mereka akan belajar, memilih yang sesuai dengan gaya kultural mereka, tidak akan ada orang yang merasa lebih diuntungkan dan atau dirugikan pada prosedur pendidikan. Pilihan semacam ini akan membawa pada persamaan yang lebih adil dalam kesempatan belajar dan lebih bersaing untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka. Aspek lain

dalam pembelajaran PABM khususnya, adalah memberikan informasi akurat tentang semua segmen keagamaan dalam masyarakat, mengembangkan kesadaran sosial, ketegasan moral, dan komitmen pada keadilan, dan menghendaki keterampilan dalam aktivisme politik untuk reformasi masyarakat agar menjadi lebih manusiawi dan simpati pada pluralitas kultural, etnik dan agama, serta adil secara moral dan egalitarian. Oleh karena itu, tujuan untuk mencapai persamaan pendidikan dan kemuliaannya meliputi kognisi, afeksi, dan keterampilan perilaku, sekaligus prinsip demokrasi.

Transformasi Lingkungan Sosial

Adalah imperatif bahwa siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan dan memahami orang lain yang secara etnik, agama, dan budaya berbeda. Indonesia adalah wilayah dengan banyak agama, suku, bahasa dan kebudayaan. Eksistensi ini harus menjadi landasan dalam *setting* pendidikan multikultural, karena interaksi lintas budaya, lintas etnik dan agama masing sering meninggalkan sikap, nilai dan harapan negatif, serta blunder kultural. Untuk itu, PABM mencoba menekankan pentingnya etiket sosial dari agama-agama untuk mengurangi frustrasi, kekhawatiran, ketakutan, kegagalan dan permusuhan dalam relasi antaragama dan etnik.

Dalam kerangka ini, PABM diarahkan untuk meringankan ketegangan dengan mengajarkan komunikasi lintas agama, relasi intragama, memahami



berbagai perspektif dan sudut pandang keagamaan, dan mengerti bahwa kondisi agama-agama dapat mempengaruhi nilai, sikap, perilaku, kepercayaan dan harapan para pemeluknya. Kompetensi sosial ini merupakan bekal untuk menghargai perbedaan agama dan kultural tanpa terjebak pada penilaian hitam-putih (*value judgment*). Guna meraih tujuan ini, siswa diberi peluang untuk mempraktikkan kompetensinya dan berinteraksi dengan berbagai kelompok, pengalaman dan situasi agama-agama dan budaya.

Seiring dengan tujuan pendidikan multikultural untuk memulai proses perubahan di sekolah, ia juga akan meluas pada masyarakat. Tujuan ini akan dilaksanakan dengan menanamkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan pada siswa

sehingga mereka dapat menjadi *agents of social change* yang komitmen pada reformasi masyarakat dengan tujuan untuk menghapuskan disparitas agama-agama dan etnik dalam kesempatan sosial, ekonomi, politik dan budaya dan berkehendak untuk melaksanakan komitmen ini. Untuk itu, mereka perlu memperbaiki pengetahuan tentang isu-isu agama dan etnik sekaligus mengembangkan kemampuan membuat keputusan, keterampilan tindakan sosial, kapabilitas kepemimpinan, ketajaman pandangan politik, dan komitmen moral pada martabat dan persamaan kemanusiaan. Mereka tidak hanya butuh pemahaman dan apresiasi mengapa pluralitas agama dan etnik sangat menonjol di nusantara namun juga perlu menerjemahkan pengetahuannya ini

dalam keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan isu-isu, peristiwa, kepedulian dan sitasi sosio-religius dan sosio-politik.

Tujuan ini dan pengembangan keterampilan yang terkait dengannya didesain untuk membuat masyarakat lebih egalitarian dan lebih menerima pluralitas agama dan budaya. Mereka juga diharapkan dapat memastikan bahwa kelompok-kelompok agama dan etnik yang secara tradisional menjadi korban dan diasingkan akan menjadi partisipan sukarela pada seluruh tingkat masyarakat, dengan seluruh hak-hak, keistimewaan, dan tanggung jawab yang dipikul mereka. PABM dengan demikian memberi kontribusi pada pengembangan keterampilan untuk menjadi warga negara demokratis. Fungsi pendidikan semacam ini perlu didekati dengan pendekatan tindakan sosial yang mengajarkan siswa bagaimana menjadi kritikus sosial, aktivis politik, agen perubahan, dan pemimpin berkompeten dalam masyarakat plural. Dengan kata lain, pendidikan ini dirancang untuk rekonstruksi sosial terhadap tatanan yang carut-marut. Pendekatan tindakan sosial memfokuskan pada penindasan dan ketidakadilan struktur sosial dengan niat untuk menciptakan suatu masyarakat agar lebih berdaya dan melayani kebutuhan dan kepentingan semua kelompok.

Pendidikan semacam ini membangun keberdayaan personal pada diri siswa dengan memantapkan relevansi pembelajaran sekolah dan kehidupan sosial, menyediakan praktik dalam menerapkan pengetahuan dan mengambil tindakan untuk mengarahkan kehidupan mereka, serta menunjukkan kekuatan pengetahuan, upaya kolaborasi, dan tindakan politik yang menghasilkan perubahan sosial.

Penutup

Mengingat intensitas dan akselerasi keragaman kultural dalam kehidupan global, serta eskalasi kekerasan, konflik, ketegangan, dan friksi antaragama, antaretnik dan antarkultur di tingkat nasional, PABM sangat urgen untuk diwujudkan. Pendidikan Agama semacam ini bermanfaat untuk menanamkan dan melakukan perubahan cara berpikir dan cara bertindak yang lebih matang dalam menghadapi dan menghargai perbedaan, dan memaknai perbedaan itu sebagai sesuatu yang tidak hanya tak tertolak, namun juga memberi nuansa bagi kehidupan. Melalui Pendidikan Agama ini, kita berharap bahwa pluralitas agama—termasuk etnik dan budaya Nusantara—dapat secara berkesinambungan dipelihara dalam relasi dan pergaulan sosial menuju tatanan yang lebih berkeadilan, setara, dan berkeadaban. ❖

Tabel I
Karakteristik Kunci Empat Perspektif Keagamaan

EKSKLUSIF	INKLUSIF	PLURALIS	MULTIKULTURALIS
<p><i>Sikap terhadap batasan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Satu jalan · Tertutup · Terpisah dan eksklusif · Batasan jelas terlihat · sepanjang masa; batasan sendiri dipertahankan dan batasan orang lain tidak dihargai. 	<ul style="list-style-type: none"> · Dua jalan · Semi tembus · Lebih utama terpisah, dapat berbaur · Batasan semi tersamar 	<ul style="list-style-type: none"> · Integritas masing-masing jalan sangat dipertahankan · Dapat ditembus · Berbaur seperti minyak dan air, mempertahankan semua batasan 	<ul style="list-style-type: none"> · Integritas masing-masing jalan dihargai, memungkinkan berbagi jalan dengan yang lain · Terbuka untuk dijelajahi · Bisa berhimpit dan tumpang tindih · Batasan relatif samar, dan memelihara semua batasan
<p><i>Sikap terhadap orang lain</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Diskriminatif/asimilasi · Komunikasi didaktik diskredit · Tidak kompromi; penyerahan total orang lain dikehendaki · Secara eksplisit bersifat kolonial · Satu pandangan dan terbaik · Sangat berbeda; orang lain inferior · Kami versus mereka · Hirarkis dan superior 	<ul style="list-style-type: none"> · Toleran atau ekumene · Sharing, resiprokal, dialog mutual · Simpati · Kompromi setengah hati · Secara implisit bersifat kolonial · Satu dan banyak pandangan sama saja · Kita semua memiliki kesamaan, ukuran orang lain tidak digunakan · Kami dan mereka · Hirarkis dan bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> · Menghargai perbedaan · Dialog mutual yang saling menghargai · Ko-eksistensi · Kompromi tanpa menghilangkan identitas · Anti-kolonial · Multifaset, dapat melihat pandangan sendiri dan orang lain tanpa perlu mengubah atau menentang pandangan sendiri atau orang lain · Berbeda tapi sama · Kami-mereka, banyak · Tiada hirarki 	<ul style="list-style-type: none"> · Keragaman hal biasa (<i>plural is usual</i>) · Sharing dan kerjasama · Pro-eksistensi · Kompromi proporsional dan rasional · Post-kolonial · Memahami dan menilai pandangan sendiri dan menghargai pandangan orang lain · Setara dalam perbedaan (<i>equal in diversity</i>) · Kita, banyak · Tiada hirarki, saling mengisi
<p><i>Sikap terhadap sensibilitas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Hanya Satu Integritasku 	<ul style="list-style-type: none"> · Banyak, integritas orang lebih inferior · Integritas tersamar 	<ul style="list-style-type: none"> · Banyak, masing-masing dengan integritasnya sendiri · Multi integritas 	<ul style="list-style-type: none"> · Banyak, saling menyapa · Multi integritas bermartabat

TABEL II
Muatan Kurikulum Empat Perspektif Pendidikan Agama

EKSKLUSIF	INKLUSIF	PLURALIS	MULTIKULTURALIS
<p>Pengetahuan tentang sistem agamanya sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> · Tidak mengakui agama lain sebagai sejati · Melihat agama lain inferior dan berbeda · Melihat agama lain tidak berharga · Melihat dunia melalui kacamata agamanya sendiri · Loyalitas ekstrem, keyakinan agama memproteksi pengaruh dunia luar · Mentalitas konversi/missionaris yang sangat kuat 	<p>Pengetahuan tentang konsep agama dan beberapa pemahaman dasar tentang pencerahan keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Melihat semua agama memiliki keserupaan · Mengakui agama lain melalui kacamata agama sendiri · Menghargai integritasi tradisi dan sistem simbol agama sendiri dan agama orang lain · Cukup cocok dan modern, perubahan sepanjang ada ide yang lebih baik · Mempertebal keyakinan insiders 	<p>Pengetahuan tentang konsep agama & memahami aspek-aspek kuncinya untuk pencerahan keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kemampuan menghubungkan antara tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda tanpa menilai hitam-putih · Setiap agama dihargai dan dihormati menurut bahasanya, sebagai entitas khusus dan unik, berbagi karakteristik dengan agama lain · Setiap agama diakui berpartisipasi menyusun jaringan dunia keagamaan · Memahami dan menilai tradisi agama sendiri, loyal terhadap agama sendiri, tidak menutup diri atas tradisi agama lain · Mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara tradisi-tradisi keagamaan · Berminat pada tradisinya sendiri, melihat dari dalam dengan parameternya sendiri, dan menghargai integritas religiusitasnya sendiri · Tidak memandang rendah agama lain · Netral, tidak mempunyai prasangka dan stereotip atas agama lain 	<p>Pengetahuan tentang dimensi-dimensi perennial agama dan kemungkinan perjumpaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> · Melihat semua agama sejati menurut bahasa universal dengan mengakui keunikan masing-masing · Kemampuan menilai dan menghargai agama sendiri dan menghargai agama orang lain adalah hal biasa dalam kehidupan · Kemampuan membuat hubungan positif dan setara dalam keragaman agama-agama · Memberi pengakuan untuk hidup dan membiarkan hidup agama-agama · Dapat menjelaskan persamaan, perbedaan dan keunikan tradisi-tradisi keagamaan untuk berbagi dan bekerjasama dalam memecahkan problem bersama manusia · Menunjukkan minat pada lintas tradisi keagamaan, saling menyapa untuk memperoleh horizon baru · Membangun budaya nirkekerasan (<i>non-violence</i>) dan perdamaian (<i>peacemaking, peacebuilding</i>) · Ketrampilan menciptakan resolusi konflik dan rekonsiliasi secara kreatif · Memberi ruang identifikasi dan pengakuan atas minoritas